RENCANA KERJA

TA 2027

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

https://bpbdmagelangkota.go.id
bpbdkotamagelang@gmail.com
(0293)3193701

Jl. Lamtoro No. 71, Tidar Baru, Kota Magelang

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang Tahun 2027 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. Renja ini menjadi dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2025–2029 serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2027.

Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan "Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana" dengan sasaran "Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana". Melalui dokumen ini, dirumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pengurangan risiko bencana, melalui peningkatan kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana secara terpadu dan terkoordinasi.

Penyusunan Renja Tahun 2027 juga mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, isu strategis kebencanaan di Kota Magelang, kebijakan nasional dan provinsi di bidang penanggulangan bencana, serta kebutuhan riil masyarakat terhadap layanan kebencanaan. Dengan demikian, Renja ini diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BPBD secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Kota Magelang yang tangguh menghadapi bencana.

Magelang, Juli 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

PUJI HARTONO, S.T.
NIP 19710717 200312 1 006

Daftar Isi

Contents

COVER i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah 56

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 68

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 72

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 106

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 106

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 107

3.3 Program dan Kegiatan 109

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 139

BAB V PENUTUP 146

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 32
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan 57
Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2027 75
Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 105
Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 108
Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028 117
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2027 140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2027. Penyusunan Renja ini merupakan implementasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang proses penyusunannya diawali melalui mekanisme partisipatif, dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Tahun 2027 merupakan tahun kedua perencanaan, yang merupakan penjabaran arah kebijakan Renstra BPBD Kota Magelang Periode 2025–2029. Periode Renstra 2025–2029, BPBD mendukung Misi ke-2 Pemerintah Kota Magelang yaitu “Meningkatnya Infrastruktur yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan”. Arah kebijakan RKPD Kota Magelang Tahun 2027 mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Ekonomi Kota Magelang yang Inklusif“. Isu Strategis yang dikawal pada tahun 2027 adalah :

1. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial untuk Masyarakat Bermartabat.

2. Penguatan Infrastruktur yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan untuk Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan
3. Penguatan Kohesi Sosial dan Harmoni dalam Keberagaman untuk Kota yang Harmonis dan Humanis
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
5. Peningkatan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif untuk Pembangunan Berkelanjutan

dengan prioritas RKPD tahun 2027 :

1 Peningkatan kinerja pembangunan untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa;
2 Peningkatan kinerja pembangunan untuk meningkatkan daya saing SDM;
3 Peningkatan kinerja pembangunan untuk peningkatan kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan;
4 Peningkatan kinerja pembangunan untuk terwujudnya kondusivitas daerah berbasis harmoni sosial;
5 Peningkatan kinerja pembangunan untuk terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan;
6 Peningkatan kinerja pembangunan untuk terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkualitas;
7 Peningkatan kinerja pembangunan untuk terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan tugas BPBD dalam membantu Wali Kota melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi, isu strategis yang dikawal dalam RKPD Tahun 2027 adalah Penguatan Infrastruktur yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan untuk Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi penanggulangan bencana pada tahap prabencana, antara lain melalui peningkatan kegiatan sosialisasi, informasi, edukasi, dan pelatihan kepada satuan petugas, relawan, Tim Reaksi Cepat, serta masyarakat, pembentukan kelurahan tangguh bencana di seluruh kelurahan;

serta penyusunan dan pemutakhiran dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Penyusunan Renja BPBD Tahun 2027 juga tidak terlepas dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044 sebagai pedoman nasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. RIPB disusun sebagai respon atas meningkatnya risiko dan kompleksitas bencana di Indonesia, baik yang bersifat hidrometeorologis akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan, maupun bencana geologis seperti letusan gunung api dan gempa bumi. Sasaran RIPB antara lain meliputi penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan, peningkatan investasi kesiapsiagaan, peningkatan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan akuntabel, serta percepatan pemulihan pascabencana yang lebih baik dan lebih aman. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, juga mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 yaitu : Akselesari Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri, melalui upaya peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana. Penanggulangan bencana yang efektif akan menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi, melindungi investasi, serta meminimalkan gangguan terhadap sektor dan produktivitas masyarakat. BPBD berperan dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur, mempercepat penanganan darurat, serta melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna menjaga stabilitas pembangunan daerah. Selain itu, pengurangan risiko bencana menjadi faktor pendukung terciptanya iklim investasi yang aman dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, Renja BPBD Tahun 2027 juga memperhatikan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan penanggulangan bencana, yaitu terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan. Dukungan BPBD diwujudkan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam pembangunan, serta panguatan ketahanan lingkungan dan masyarakat terhadap ancaman bencana. Hal ini mendukung keberlanjutan sektor-sektor

produktif, menjaga kelestarian sumber daya alam, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan pedoman nasional penanggulangan bencana di dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana, tema Rencana Kerja Pemerintah, sasaran Pembangunan provinsi Jawa Tengah, sasaran dan arah kebijakan Pembangunan Kota Magelang tahun 2027, serta mandat kelembagaan BPBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 disusun untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan indikatif yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Melalui Renja Tahun 2027, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Magelang dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi, profesional, dan berorientasi pada pengurangan risiko, sehingga mendukung terwujudnya Kota Magelang yang berdaya tahan terhadap bencana.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Magelang Tahun 2027 disusun sebagai dasar normatif yang menjadi pijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan perangkat daerah. Landasan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyusunan Renja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 disusun berdasarkan pada :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33);
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2026 Nomor 7)
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelan
31. Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 000.7.2.4/168/410 Tahun 2026 Tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD BPBD Kota Magelang sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027

dan mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2027. Maksud dari penyusunan Renja OPD ini adalah:

1. Memberikan pedoman bagi BPBD Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD)
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026
3. Sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja tahunan.

Adapun tujuan Renja OPD BPBD Kota Magelang Tahun 2027, yakni:

1. Untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan guna mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Untuk menciptakan sinergitas dalam implementasi pembangunan daerah antar wilayah dan antar sektor pembangunan, serta antar tingkat pemerintahan.
3. Untuk efisiensi alokasi sumber daya dalam kualitas pembangunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai struktur dan alur penyajian materi, sehingga memudahkan pemahanan terhadap isi dokumen. Penyusunan sistematika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman perencanaan pembangunan daerah. Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisa Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja

tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalan NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan perioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan umum rencana kerja yang mencakup program dan kegiatan perangkat daerah, beserta pagu anggarannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangkat pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Magelang Tahun 2027.

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksankan pada tahun sebelumnya, serta menilai ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan Renstra BPBD Kota Magelang Tahun 2025-2029.

Melalui evaluasi tersebut, dapat diidentifikasi berbagai capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, serta tindak lanjut yang diperlukan sebagai bahan perbaikan dalam perencaan tahun berikutnya. Selain itu, evaluasi juga menjadi dasar untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah, isu strategis penanggulangan bencana, serta arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, BPBD Kota Magelang perlu memastikan bahwa pelaksanaan program pada tahab prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana dapat berjalan secara efektif, efisien, serta berkontribuasi terhadap peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di Kota Magelang. Potensi risiko bencana tetap perlu diantisipasi. Kondisi geografis, perubahan iklim, serta meningkatnya potensi kejadian cuaca ekstrem dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, maupun kebakaran. Oleh karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu diarahkan pada upaya penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta

koordinasi lintas sektor agar risiko bencana dapat diminimalkan dan kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana semakin meningkat.

Di sisi lain, karakteristik kejadian bencana di Kota Magelang juga berdampak pada pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran BPBD. Alokasi dana yang disediakan untuk penanganan keadaan darurat, termasuk dana kontinjensi, pada beberapa tahun anggaran dimungkinkan tidak terserap secara optimal apabila tidak terjadi bencana yang memenuhi kriteria penggunaan anggaran tersebut. Demikian pula, beberapa indikator kinerja yang berkaitan dengan penanganan tanggap darurat dan pascabencana berpotensi tidak mencapai target, bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja perangkat daerah, melainkan karena tidak terdapat kejadian bencana yang memerlukan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Oleh karena itu, evaluasi kinerja BPBD perlu mempertimbangkan karakteristik risiko dan kejadian bencana di daerah, sehingga capaian kinerja tidak semata-mata diukur dari besarnya realisasi anggaran atau banyaknya penanganan bencana, tetapi juga dari keberhasilan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta terpeliharanya kondisi Kota Magelang yang tetap aman dan tangguh terhadap potensi bencana.

Pelaksanaan Renja BPBD Kota Magelang tahun 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana . Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5.141.668.993 dengan realisasi sebesar Rp. 4.558.788.697 atau sebesar 88.66%. Realisasai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan, meskipun terdapat efisiensi maupun kegiatan yang belum terealisasi secara optimal.

Pada Tahun 2025, target IKD ditetapkan sebesar 57,40 dengan realisasi sebesar 53 atau mencapai 92,33% dari target. Belum tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana yang perlu ditingkatkan, antara lain penyempurnaan dokumen perencanaan kebencanaan, penguatan kelembagaan, peningkatan

koordinasi lintas sektor, serta pemenuhan indikator-indikator pembentuk IKD yang belum optimal.

Adapun realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan melebihi target kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja antara lain:
    1. Subkegiatan Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota , pada kegiatan Pelayaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, subkegiatan ini diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran yaitu terlaksananya respon cepat darurat bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana.

       Dalam Pelaksanaannya, hingga saat ini kejadian di Kota Magelang masih didominasi kejadian berskala kecil, seperti pohon tumbang, rumah roboh akibat faktor usia bangunan, serta kejadian kedaruratan lainnya yang belum memenuhi kriteria penetapan status darurat bencana. Meskipun demikian. Tim reaksi cepat tetap melaksanakan asasment, pananganan awal, koordinasi lintas esktor, serta dukungan evakuasi secara cepat guna memastikan setiap kejadian tertangani dengan baik. Pada subkegiatan ini dukungan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 159.272.120,- dengan realisasi sebesar Rp. 141.349.800,- atau sebesar 99.75, namun atas kinerja ini berupa Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat, tidak tercapai.
    2. Subkegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp4.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.199.000 atau sekitar 24,98 persen. Rendahnya realisasi anggaran dipengaruhi oleh tidak adanya kejadian bencana di Kota Magelang yang memerlukan operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban dalam skala kebencanaan. Adapun realisasi kegiatan

yang dilaksanakan di lapangan digunakan untuk mendukung operasi pencarian anak hilang di aliran sungai sebagai bentuk respon kemanusiaan dan penanganan kondisi kedaruratan yang memerlukan keterlibatan personel serta peralatan BPBD Kota Magelang. Meskipun kegiatan tersebut bukan merupakan kejadian bencana, pelaksanaan ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam mendukung penanganan situasi darurat di masyarakat.

Dengan demikian, capaian kinerja subkegiatan ini belum dapat dikatakan optimal terhadap target utama yang ditetapkan, karena tidak terdapat kejadian bencana yang sesuai dengan indikator subkegiatan, namun kesiapan layanan tetap terlaksana saat dibutuhkan

3. Subkegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dengan sasaran terlaksananya pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota. Subkegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp11.568.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp0 atau 0 persen. Target kinerja yang ditetapkan sebanyak 1 laporan, dengan realisasi sebesar 0. Tidak terealisasinya subkegiatan tersebut disebabkan selama tahun 2025 tidak terdapat kejadian di Kota Magelang yang memenuhi kriteria penetapan status darurat bencana sehingga tidak memerlukan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana secara formal. Kejadian yang terjadi selama tahun berjalan masih bersifat insidental, berskala kecil, dan dapat ditangani melalui respon cepat serta koordinasi lintas sektor tanpa harus melakukan pengerahan komando darurat secara penuh. Meskipun demikian, BPBD Kota Magelang tetap menjaga kesiapsiagaan personel, peralatan, serta mekanisme koordinasi agar sistem komando dapat segera diaktifkan apabila terjadi kondisi darurat bencana yang memerlukan penanganan lebih lanjut
4. Subkegiatan Koordinasi dan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 31.344.000,- serta realisasi sebesar Rp. 21.349.500 atau sebesar 68.11%. Adapun realisasi

kinerja terealisir 0. Tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan selama tahun 2025 tidak terdapat kejadian bencana di Kota Magelang yang menimbulkan dampak besar serta memenuhi kriteria untuk dilakukannya penanganan pascabencana secara formal yang masuk dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Realisasi anggaran yang telah dilaksanakan digunakan untuk mendukung koordinasi penanganan terhadap beberapa kejadian yang memerlukan tindak lanjut karena belum sepenuhnya terselesaikan pada saat kondisi kedaruratan. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa penetapan target kinerja pada subkegiatan ini terlalu tinggi dan belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik risiko bencana di Kota Magelang, di mana dalam beberapa tahun terakhir belum terdapat kejadian bencana yang memerlukan penyusunan dokumen R3P secara formal. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan riil penanganan pascabencana di daerah.

5. Subkegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 28.889.700 dan realisasi sebesar 28.852.700 atau sebesar 99.87 %.

   Target kinerja pada subkegiatan ini adalah pelayanan logistik bagi 15 orang korban bencana, namun dalam pelaksanaannya realisasi mencapai 25 orang atau sebesar 166.67%. Capaian tersebut menunjukkan pelayanan penyediaan logistik tetap dapat diberikan secara responsif kepada masyarakat yang terdampak kejadian kedaruratan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa penerima logistik tersebut bukan merupakan korban bencana yang, sesuai dengan kategori bencana menurut undang-undang. Selama periode pelaporan, tidak ada bencana di Kota Magelang yang masuk katerogi bencana.

   Dengan demikian, meskipun secara kuantitatif telah melampaui target, secara substansi capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan penanganan korban bencana sebagaimana tujuan

indikator. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik kejadian di Kota Magelang lebih banyak berupa kedaruratan nonbencana yang tetap memerlukan dukungan logistik sebagai bentuk pelayanan kemanusiaan dan respons cepat BPBD kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap karakteristik dan dampak kejadian, kondisi tersebut belum memenuhi kriteria dan ambang batas ditetapkan sebagai bencana apalagi masuk dalam kategori bencana yang memerlukan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena kejadian bencana di Kota Magelang tidak memenuhi kriteria ambang batas Kejadian Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Standar Kejadian Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Adapun Kriteria Ambang Batas Kejadian Bencana dimaksud adalah sebagai berikut:

1) 1 orang meninggal dunia
2) 50 orang terdampak/luka/mengungsi
3) 5 unit rumah dan atau fasilitas public rusak
4) 1 hektar lahan
5) Permintaan pemerintah daerah untuk diberikan bantuan nasional
6) Penentuan status keadaan darurat bencana

Ambang batas kejadian bencana dalam penentuan kejadian bencana dengan penyebabnya adalah satu dari jenis bencana setidaknya memenuhi satu dari 6 kriteria ambang batas tersebut.

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja antara lain:
    1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, anggaran sebesar Rp. 2.581.500,- , realisasi sebesar 2.491.500,- atau sebesar 96.51 , dengan realisasi kinerja sebesar 3 dokumen perencanaan perangkat daerah berupa rencana kerja perangkat daerah tahun 2026, perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 serta Rencana Strategis tahun 2025-2029 atau sebesar 100%

2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, anggaran sebesar Rp. 444.000,- realisasi sebesar Rp. 435.400,- atau sebesar 98%, dengan realisasi kinerja 1 dokumen RKA tahun 2026 atau sebesar 100%
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD , dengan anggaran sebesar Rp. 444.000,- realisasi sebesar Rp. 423.500,- ayau sebesar 95.38%, dengan realisasi kinerja berupa 1 dokumen perubahan RKA-SKPD tahun 2026 atau sebesar 100%
4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, anggaran sebesar Rp. 754.800,-, realisasi sebesar Rp. 740.200,- atau sebesar 98.07%, serta realisasi kinerja berupa 1 dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025, atau sebesar 100%.
5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, anggaran sebesar Rp. 613.600,- realisasi sebesar Rp. 599.300,- atau sebesar 97.67%, dengan realisasi kinerja berupa 1 dokumen perubahan pelaksanaan anggaran tahun 2025, atau sebesar 100%
6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 2,412.628,- realisasi sebesar Rp. 2.346.000,- atau sebesar 97.24%, dengan realisasi kinerja berupa 12 laporan capaian kinerja bulanan serta 1 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) 2024, atau sebesar 100%
7. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 3.724.509.012,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.225.349.868,- atau sebesar 86.60%, dengan realisasi kinerja berupa 18 orang ASN yang menerima gaji dan tunjangan atau sebesar 100%, secara umum serapan anggaran pada subkegiatan ini cukup baik serta menunjukan bahwa pelaksanaan pembayaran hak kepegawaian telah berjalan sesuai kebutuhan, perlu menjadi catatan, bahwa pada rekening tunjangan keluarga PPPK serapan anggaran dibawah 50% dengan realisasi anggaran sebesar 4.822.080,- dari anggaran sebesar Rp. 9.654.049 atau sebesaar 49.95%. Sebagai bahan evaluasi, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian didalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya

agar perencanaan belanja pegawai dapat disusun lebih akurat, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan riil, sehingga dapat meminilisasi terjadinya sisa anggaran yang cukup signifikan.

8. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp. 319.800,- dari Rp. 334.000,- atau sebesar 95.75%, realisasi kinerja berupa 1 laporan keuangan akhir tahun 2024 atau sebesar 100%.
9. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, anggaran sebesar Rp. 5.245.700,- , realisasi sebesar 5.128.000,- atau sebesar 97.76%, capaian kinerja berupa 12 laporan keuangan atau sebesar 100%
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 2.986.700,- realisasi sebesar Rp. 2.978.954,- atau sebesar 99.76%. dengan capaian kinerja berupa 4 paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan atau 100%
11. Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor, anggaaran sebesar Rp. 1.011.400,- realisasi sebesar Rp. 992.000,- atau sebesar 98.08 %. Capaian kinerja berupa 2 paket peralatan dan perlangkapan kantor atau 100%
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran sebesar Rp. 26.360.400,- realisasi sebesar Rp. 25.750.427,- atau sebesar 97.68%, dengan capaian kinerja berupa 12 paket logistik atau 100%
13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 7.237.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 7.231.950,- atau sebesar 99.93% dengan capaian kinerja berupa 8 paket barang cetakan dan penggandaan atau 100%
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp. 3.240.000,- realisasi sebesar Rp. 3.230.000,- atau sebesar 99.69% dengan capaian kinerja berupa 3 dokumen bahan bacaan atau 100%

15. Penyediaan Bahan Material, anggaran sebesar Rp. 11.466.500,- realisasi sebesar Rp. 11.460.250,- atau sebesar 99.95, dengan capaian kinerja berupa 12 paket material atau 100%.
16. Fasilitasi Kunjungan Tamu, anggaran Rp. 720.000,- realisasi sebesar Rp. 719.500,- atau sebesar 99.93% dengan capaian kinerja sejumlah 12 laporan atau 100%
17. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran sebesar 27.326.000,- , realisasi sebesar Rp. 27.266.534,- atau sebesar 99.78% dengan capaian kinerja berupa 12 laporan, atau sebesar 100%
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran sebesar Rp. 51.000.000, realisasi sebesar Rp. 50.700.000,- atau sebesar 99.41% dengan capaian kinerja berupa 3 unit lapop atau sebesar 100%
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar Rp. 12.956.300,- realisasi sebesar Rp. 12.908.150,- atau sebesar Rp. 99.63% dengan capaian kinerja berupa 12 laporan atau sebesar 100%
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp. 59.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.630.299,- atau sebesar 78.50%, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan sebesar Rp59.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp46.630.299,00 atau 78,50%. Capaian kinerja kegiatan berupa 12 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik telah terealisasi 100% sesuai target yang ditetapkan. Meskipun target kinerja tercapai sepenuhnya, serapan anggaran belum optimal karena kebutuhan riil belanja selama pelaksanaan kegiatan lebih rendah dibandingkan dengan yang diperkirakan pada saat penyusunan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih dapat disempurnakan sehingga dalam perencanaan tahun mendatang perlu dilakukan penghitungan kebutuhan yang lebih cermat berdasarkan realisasi dan kebutuhan nyata, agar penganggaran menjadi

lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran sebesar Rp. 55.021.680,- realisasi sebesar Rp. 55.002.058,- atau sebesar 99.96% dengan capaian kinerja berupa 12 laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor atau sebesar 100%.
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 80.954.930,- realisasi anggaran sebesar Rp. 72.515.909,- atau sebesar 89.58% dengan capaian kinerja berupa 11 unit kendaraan dinas jabatan yang terpeliharan atau sebesar 100%, Meskipun pada subkegiatan ini kinerjanya tercapai 100% namun serapan anggaran belum optimal, hal ini disebabkan bahwa terdapat penganggaran pada rekening belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan yang terlalu tinggi, mengingat serapan anggaran pada rekening ini hanya 43.18% atau sebesar 6.044.500,- dari anggaran sebesar Rp. 14.000.000,-
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran sebesar Rp. 41.213.462,- realisasi anggaran sebesar Rp. 38.679.984 atau sebesar 93.85% dengan capaian kinerja berupa 2 unit kendaraan operasional lapangan yang terpelihara.
24. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota, anggaran Rp. 19.280.800,- , realisasi sebesar Rp. 19.218.100,- atau sebesar 99.67%, dengan capaian kinerja 120 orang yang mendapatkan sosialisasi , edukasi rawan bencana atau sebesar 100%
25. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 121.779.995,- realisasi sebesar Rp. 119.187.560,- atau sebesar 97.87% dengan capaian kinerja berupa 15 unit peralatan kebencanaan , atau sebesar 100%

26. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, anggaran Rp. 23.728.236,-, realisasi sebesar Rp. 23.341.400,- atau sebesar 98.37% dengan capaian kinerja 150 orang yang mengikuti gladi kesiapsiagaan atau sebesar 100%.
27. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, anggaran sebesar Rp. 29.027.600,- , realisasi sebesar Rp. 28.647.000,- atau sebesar 98.69% dengan capaian kinerja 2 kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana atau sebesar 100%.
28. Penyusunan Rencana Kontijensi, anggaran sebesar Rp. 74.321.400,-, realisasi sebesar Rp. 70.741.130,- atau sebesar 95.18% dengan capaian kinerja berupa 1 dokumen rencana kontijensi gempabumi, degan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Penyusunan Rencana Kontijensi, anggaran sebesar Rp. 74.321.400,-, realisasi sebesar Rp. 70.741.130,- atau sebesar 95.18% dengan capaian kineja berupa 1 dokumen rencana kontijensi gempabumi, atau sebesar 100%. Meskipun secara anggaran dan kinerja tercapai sangat baik, namun masih terdapat penganggaran pada subkegiatan ini yang tidak tepat sehingga sama sekali tidak dapat direalisasikan yaitu , Belanja Makanan dan Minuman Tamu, yang seharusnya Belanja Jamuan Jamuan Rapat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), khususnya dalam pemilihan akun belanja yang sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan serta ketentuan klasifikasi belanja yang berlaku. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan penguatan proses perencanaan dan verifikasi anggaran melalui koordinasi yang lebih intensif antara pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan, sehingga alokasi anggaran dapat disusun secara lebih tepat, efektif, dan optimal serta meminimalkan terjadinya anggaran yang tidak dapat direalisasikan.
29. Pengendalian Operasi dan Penyediaaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, anggaran ebesar

Rp. 196.481.018,-, realisasi sebesar Rp. 195.553.644,- atau sebesar 99.53% dengan capaian kinerja berupa 12 laporan pengendalian operasi kesiapsiagaan atau sebesar 100%.

30. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 35.333.600,-, realisasi sebesar Rp. 35.092.500,- atau sebesar 99.32% dengan capaian kinerja 3 kawasan yang dilaksanakan pelatha pencegahan dan mitigasi bencana.
31. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas, anggaran sebesar Rp. 44.416.220,-, realisasi sebesar Rp. 4.374.700,- atau sebesar 99.06%, dengan capaian kinerja berupa 3 laporan koordinasi triwulanan, atau sebesar 100%.

C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja :

Realisasi kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu mencapai hasil di atas tingkat kinerja yang direncanakan. Kondisi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap tingkat ketepatan dan tingkat tantangan (challenge) target yang ditetapkan. Capaian yang secara konsisten melebihi target dapat mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan belum cukup menantang, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali dalam penetapan target pada periode berikutnya agar lebih realistis, terukur, dan memberikan dorongan terhadap peningkatan kinerja. Namun demikian, capaian yang melebihi target juga perlu dianalisis dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan kondisi pelaksanaan kegiatan yang memengaruhinya. Namun, pada tahun anggaran 2025 tidak ada kinerja yang melebihi target atau NIHIL.

Sedangkan target realisasi anggaran tahun 2026, sampai dengan triwulan 2, di rencanakan 84.49% atau sebesar Rp. 3.040.019.406,- dari total anggaran sebesar Rp. 3.776.890.802,-. Tingginya target realisasi pada semester pertama mencerminkan strategi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan pencapaian target kinerja perangkat daerah secara tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dan monitoring yang konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan agar realisasi anggaran dapat tercapai

sesuai rencana serta meminimalkan potensi kendala yang dapat memengaruhi pencapaian target pada akhir tahun anggaran. Hasil evaluasi sampai dengan triwulan 2 ternyata realisasi anggaran hanya tercapai 43.80% atau sebesar Rp. 1.654.344.965,-, Hal ini dapat dijelaskan secara rinci sebagai sebagai berikut :

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, target realisasi sebesar 100% namun hanya terealisir sebesar 73.06%, hal ini disebabkan adanya Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi berupa berupa bendera merah putih sebesar Rp. 103.300,- belum dibelanjakan.
2. Penyediaan bahan logistik kantor, target realisasi sebesar 73.76%, namun realisasi hanya sebesar 63.89%. Hal ini disebabkan adanya belanja isi tabung gas serta belanja natura, yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan.
3. Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, ditargetkan mencapai realisasi sebesar 100%, namun sampai dengan triwulan 2, realisasi baru mencapai 63,89%, kondisi ini disebabkan oleh pelaksanaan belanja surat kabar yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana. Target penyediaan sebanyak 2 eksemplar surat kabar setiap bulan, realisasi yang dilakukan hanya satu eksemplar.
4. Subkegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, ditargetkan sebesar 69.42%, namun realisasinya baru sebesar 38.54%. Realisasi kegiatan hingga triwulan 2 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena pelaksanaan untuk kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang penting dan wajib, mengingat keterbatasan anggaran, sehingga untuk penggunaannya dilakukan secara selektif sesuai tingkat urgensinya.
5. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ditargetkan sebesar 49.04% dengan realisasi anggaran sebesar 36.88%. Realisasi kegiatan ini masih di bawah target ,karena pembayaran rekening Listrik, Air dan Internet dilaksanakan sesuai dengan penggunaan. Sampai dengan Triwulan II, tingkat konsumsi masih berada dalam batas kebutuhan sehingga nilai tagihan yang dibayarkan lebih rendah dari alokasi yang telah

disediakan. Kondisi tersebut menunjukkan penggunaan anggaran yang direalisasi sesuai dengan kebutuhan operasional.

6. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, ditargetkan sebesar 34.09%, dengan realisasi anggaran sebesar 21.83%. Hingga Triwulan II, realisasi anggaran baru mencapai 21,83%. Kondisi tersebut disebabkan karena dalam subkegiatan ini terdapat rekening belanja yang digunakan untuk membiayai kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus pemeliharaan kendaraan. Mengingat harga BBM berfluktuasi selama tahun berjalan, penggunaan anggaran untuk BBM dilakukan secara cermat dan terukur agar tetap tersedia alokasi yang memadai untuk kebutuhan pemeliharaan kendaraan. Dengan demikian, realisasi anggaran hingga Triwulan II disesuaikan dengan kebutuhan operasional riil serta sebagai upaya menjaga kecukupan anggaran sampai akhir tahun.
7. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan,ditargetkan sebesar 57.84%, namun realisasi sampai dengan triwulan 2 baru tercapai sebesar 39.97%, sama halnya dengan kegiatan diatasnya bahwa realisasi anggaran disesuaikan dengan operasional nyata serta sebagai upaya menjaga kecukupan anggaran sampai akhir tahun.
8. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, ditargetkan sebesar 93.03%, namun hanya terserap sebesar 10.37% sampai dengan triwulan 2, realisasi anggaran baru mencapai 10,37%. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan karena anggaran pada subkegiatan ini disediakan sebagai langkah antisipatif untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan apabila terjadi kerusakan pada peralatan dan mesin. Mengingat waktu dan tingkat kerusakan tidak dapat diprediksi, penggunaan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil. Hingga Triwulan II, kebutuhan pemeliharaan yang memerlukan pembiayaan masih relatif terbatas, sehingga realisasi anggaran masih berada di bawah target.

9. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ditargetkan 100% sampai dengan triwulan 2, namun realisasi 0%. Kondisi ini disebabkan karena pada awal perencanaan anggaran, subkegiatan tersebut dialokasikan untuk mendukung pengembangan aplikasi kebencanaan "Kentongan". Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi terhadap kondisi teknologi informasi yang dimiliki, prioritas kebutuhan bergeser pada pemeliharaan dan penguatan keamanan website BPBD yang terindikasi mengalami gangguan keamanan . Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan memerlukan penyesuaian terhadap ruang lingkup pekerjaan dan proses administrasi agar sesuai dengan kebutuhan aktual organisasi. Dengan adanya perubahan prioritas tersebut, pelaksanaan kegiatan belum dapat direalisasikan hingga Triwulan II dan direncanakan akan dilakukan penggerseran anggaran pada perubahan renja 2026, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi penyelenggaraan layanan informasi kebencanaan.
10. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten/kota, ditargetkan sebesar 100%, namun sampai dengan triwulan 2 hanya tercapai sebesar 79.89%. Secara kinerja pada subkegiatan ini sudah tercapai 100% sehingga seluruh target kinerja yang direncanakan telah terlaksana. Belum optimalnya realisasi anggaran disebabkan alokasi anggaran nara sumber yang tidak direncanakan dengan baik. Sisa anggaran tersebut selanjutnya akan dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada periode berikutnya melalui kolaborasi dengan, instansi vertikal, yang ikut berpartisipasi di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian, anggaran yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memperluas jangkauan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
11. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, ditargetkan sebesar 96.82%, namun sampai dengan akhir triwulan 2 hanya mencapai target sebesar 22.99%, Rendahnya capaian realisasi tersebut disebabkan masih adanya beberapa belanja yang

mengalami penundaan pelaksanaan. Dari total 17 unit sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang direncanakan, sampai dengan akhir triwulan 2 baru 16 unit yang dapat direalisasikan baik secara fisik maupun keuangan. Selanjutnya, masih terdapat 1 unit peralatan berupa chain saw/mesin gergaji khusus pemotong beton yang mengalami kendala dalam proses pengadaan. Kendala tersebut disebabkan peralatan dimaksud merupakan produk luar negeri sehingga memerlukan persetujuan Sekretaris Daerah Kota Magelang. Selain itu, proses pengadaan juga mensyaratkan adanya pembanding dari penyedia lain dengan spesifikasi teknis dan merek dagang yang sama, sementara penyedia yang memenuhi persyaratan tersebut sangat terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pengadaan belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir triwulan 2.

12. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, ditargetkan sebesar 100%, namun sampai dengan akhir triwulan 2 hanya tercapai 68.83%, kondisi ini hamper sama dengan yang terjadi pada subkegiatan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten/kota. Secara kinerja pada subkegiatan ini sudah tercapai 100% sehingga seluruh target kinerja yang direncanakan telah terlaksana. Belum optimalnya realisasi anggaran disebabkan alokasi anggaran nara sumber yang tidak direncanakan dengan baik. Sisa anggaran tersebut selanjutnya direncanakan akan dilakukan penggeseran pada perubahan renja tahun 2026.
13. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten/kota, ditargetkan sebesar 78.85%, namun sampai dengan akhir triwulan 2 baru tercapai 25.99%. Belum optimalnya realisasi anggaran terutama disebabkan oleh belum selesainya pengadaan pakaian olahraga yang diperuntukkan bagi personel Tim Reaksi Cepat (TRC). Keterlambatan tersebut terjadi karena pakaian yang akan diadakan menggunakan spesifikasi bahan tertentu yang tidak semua penyedia dapat memenuhinya. Meskipun metode pengadaan dilaksanakan melalui penunjukan langsung,

proses pengadaan belum dapat diselesaikan tepat waktu karena penyedia belum mampu memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut mengakibatkan penyelesaian pengadaan mengalami keterlambatan sampai dengan akhir Triwulan 2. Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ke depan akan dilakukan peninjauan kembali terhadap proses pengadaan melalui adendum kontrak, sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dan ketentuan normatif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

14. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota, ditargetkan sebesar 83.24%, belum optimalnya realisasi tersebut disebabkan oleh keterlambatan dalam proses administrasi pengadaan pada beberapa rekening belanja, sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan pembayaran. Kondisi ini mengakibatkan sebagian keuangan belum dapat dicapai sesuai target pada periode pelaporan serta adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga berdampak realisi keuangan dan fisik tidak tercapai.
15. Subkegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, ditargetnya sebesar 99.32% pada akhir triwulan 2, belum optimalnya realisasi anggaran disebabkan oleh penempatan rencana penarikan dana (anggaran kas) yang kurang sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Selain itu, terdapat alokasi belanja narasumber dari unsur pimpinan DPRD yang tidak dapat direalisasikan sebagai tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa anggota DPRD tidak diperkenankan menjadi narasumber karena tidak memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Akibatnya, alokasi anggaran untuk belanja narasumber tersebut tidak digunakan sehingga memengaruhi capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini, selanjutnya atas anggaran tersebut akan disesuaikan pada perubahan anggaran.
16. Subkegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, Subkegiatan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota,

Subkegiatan Penyediaan LogistikPenyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaen/Kota, Subkegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana merupakan kegiatan yang bersifat Cadangan bila terjadi kedaruratan , yang memerlukan penanganan segera. Oleh karena itu, besaran realisasi anggaran maupun capaian fisik pada subkegiatan tersebut sangat bergantung pada frekuensi, jenis, dan tingkat keparahan kejadian bencana yang terjadi selama periode berjalan. Dengan demikian, realisasi subkegiatan tidak sepenuhnya mengikuti target penyerapan anggaran yang telah direncanakan, melainkan menyesuaikan kebutuhan penanganan darurat di lapangan. Pendekatan ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran agar dana siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung penanganan keadaan darurat secara cepat, tepat, dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku

17. Subkegiatan Koordinasi dan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota , sama halnya dengan sub kegiatan penanganan darurat, yaitu pelaksanaannya sangat bergantung pada terjadinya bencana yang mengakibatkan kebutuhan penanganan pascabencana. Ruang lingkup subkegiatan ini meliputi koordinasi, pendataan, pengkajian kebutuhan pascabencana, serta fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai tingkat kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, realisasi anggaran dan capaian kinerja pada subkegiatan ini tidak dapat diprediksi secara pasti sejak tahap perencanaan, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penanganan pascabencana yang terjadi selama periode berjalan. Apabila kejadian bencana yang memerlukan penanganan pascabencana relatif sedikit atau dampaknya dapat ditangani melalui mekanisme penanganan darurat tanpa memerlukan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi, maka realisasi anggaran pada subkegiatan ini akan cenderung rendah.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	300%
	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	300%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	90.08	90.08	90.10	90.08	0.99%	90.13	270.29	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Nilai Kearsipan	65.38	65.38	71.49	71.49	100%	74.49	211.36	323.28%
		Nilai KOD	33.00	33.00	37.00	37.00	100%	40	110	333.33%
		MRI	3.000	3.000	3.000	3.000	100%	3.0010	9.001	300%
	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	300%	300%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	2 Dokumen	7 Dokumen	350%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	39 Dokumen	300%
	Administrasi keuangan perangkat daerah	**Persentase administrasi keuangan yang disediakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	300%	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	16 orang	20 orang	20 orang	100%	20 Orang	56 Orang	14%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 dokumen	-	-	100%	-	12 Dokumen	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 Laporan	300%
	Administrasi umum perangkat daerah	**Persentase Administrasi Umum Yang disediakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	300%	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	1 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	9 Paket	450%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan-	1 paket	6 paket	2 paket	2 paket	100%	1 Paket	9 Paket	900%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 Paket	36 Paket	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	6 paket	8 paket	8 paket	100%	6 paket	20 Paket	666.66%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 Dokumen	300%
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	19 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 Paket	189.47%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 Laporan	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 Laporan	300%
	Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**0**	**100%**	**100%**	100%	100%	300%	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	-	3 unit	3 unit	100%	4 Unit	7 Unit	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	300%	3005%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 Laporan	300%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 Laporan	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	12 laporan	36 Laporan	300%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	11 unit	11 unit	11 unit	100%	4 Unit	26 Unit	236.36%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	9 unit	13 Unit	130%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang dipelihara	24 unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	7 Unit	23 Unit	38.33%
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	300%
	Program penanggulangan bencana	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	**Jumlah kegiatan pelayanan informasi rawan bencana**	**1 laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	100%	1 laporan	3 laporan	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 org	120 orang	60 orang	60 orang	100%	120 Orang	300 Orang	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan								
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	6 unit	20 unit	16 unit	16 unit	100%	18 Unit	54 Unit	900%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	70 orang	100 orang	150 orang	150 orang	100%	120 Orang	370 Orang	528.57%
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	100%	1 Kawasan	5 Kawasan	250%%
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	70 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 Orang	90 Orang	128.57%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	2 Orang	100%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	100%	2 Kawaasan	8 Kawasan	266.66% %
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	300%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	-	1 dokumen	0	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 Orang	3 Orang	300%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60 orang	43 orang	25 orang	25 orang	100%	20 Orang	88 Orang	146.66%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupatan/Kota	1 laporan	0	1 laporan	0	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase jumlah dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penanganan Pasca Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	1 Kegiatan	13 Kegiatan	108.33% %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilakukan untuk menilai tingat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, khususnya sub urusan bencana yeng menjadi kewenangannya. Penilaian ini mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta indikator lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dari aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM), BPBD berperan dalam memastikan terpenuhinya pelayanan dasar kepada masyarakat pada saat, sebelum, dan setelan terjadi bencana. Capaian SPM dapat diukur melalui indikator pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakasi korban bencana.

Dari aspek indikator Kinerja Kunci (IKK) kinerja BPBD dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, meningkatkan respons penanganan darurat bencana serta penanganan pascabencana. Pencapaian indikator tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah. Selain itu, keberhasilan pencapaian IKK juga menunjukkan tingkat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Adapun capaian kinerja BPBD Kota Magelang berdasarkan 2 aspek di atas dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Magelang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase penyelesaian dokumen smp dengan dinyatakan sah/legal (KRB)	√		-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yg memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (Sosialiasi KIE)	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
3	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal (RPB)	√		-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-
4	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal (RENKON)	√		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (pelatihan Pencegahan dan Mitigasi)	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
6	Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan (Gladi Kesiapsiagaan thd Bencana)	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
7	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana (pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan thd Bencana)	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
8	Persentase jumlah warga negara yg mendapat peralatan perlindungan (Penyediaan Peralatan Perlindungan dan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kesiapsiagaan thd Bencana)											
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas)	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (Respon Cepat Darurat Bencana)	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana (Aktivasi Sistem Komando Penangann Darurat Bencana)	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap bencana (pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana)	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
13	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		√	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
14	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dengan melihat tabel indikator kinerja pembangunan daerah, BPBD Kota Magelang mengampu 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana serta 3 indikator kinerja kunci (IKK) yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Indikator tersebut mencerminkan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya berkaitan dengan penanganan kejadian bencana pada saat terjadi, tetapi mencakup rangkaian upaya yang bersifat komprehensif mulai dari pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penyediaan informasi rawan bencana, penanganan kedaruratan, penyelamatan dan evakuasi, penyediaan logistik, hingga pemulihan pascabencana.

Pemenuhan indikator SPM dan IKK tersebut memerlukan dukungan tidak hanya dari BPBD, tetapi juga keterlibatan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, mengingat penanggulangan bencana merupakan urusan yang bersifat lintas sektor.

Selain itu, karakteristik penanggulangan bencana memiliki perbedaan dengan sebagian besar urusan pembangunan lainnya karena kejadian bencana bersifat tidak dapat diprediksi secara pasti, baik waktu, lokasi, jenis, maupun besaran dampaknya. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap pencapaian beberapa indikator kinerja, khususnya indikator yang berkaitan dengan penanganan kedaruratan, penyelamatan dan evakuasi, serta pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, penetapan target kinerja dan kebutuhan pendanaan perlu mempertimbangkan karakteristik risiko dan kemungkinan kejadian bencana serta tidak semata-mata menggunakan pendekatan target kegiatan yang bersifat rutin.

Selanjutnya, dukungan terhadap pencapaian 11 indikator SPM dan 7 IKK perlu diikuti dengan dukungan kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, data dan informasi, serta penganggaran yang memadai. Dukungan tersebut diperlukan agar pencapaian indikator tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menggambarkan peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan bencana dan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.

A. Indikator SPM Sub Urusan Bencana

1. Persentase Penyelesaian Dokumen SPM yang Dinyatakan Sah/Legal

   Indikator ini menggambarkan tingkat penyelesaian dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang diperlukan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan sub urusan bencana, dengan memperhatikan aspek keabsahan atau legalitas dokumen melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, dan Penyusunan Rencana Kontijensi. Keberadaan dokumen yang telah disahkan menjadi penting karena tidak hanya menunjukkan bahwa dokumen telah disusun, tetapi juga memberikan kepastian terhadap status dokumen sebagai dasar pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana.

   Sampai dengan saat ini, seluruh dokumen perencanaan penanggulangan bencana di Kota Magelang belum memperoleh pengesahan/legalisasi sesuai ketentuan yang diperlukan. Dengan demikian, meskipun beberapa dokumen telah tersedia atau telah disusun, keberadaannya belum seluruhnya dapat diperhitungkan sebagai dokumen yang telah sah/legal dalam pengukuran indikator.

   Kondisi tersebut berpengaruh terhadap capaian indikator persentase penyelesaian dokumen SPM, karena ukuran keberhasilan tidak hanya didasarkan pada tersusunnya dokumen, tetapi juga pada status pengesahan/legalitas dokumen tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan fasilitasi bersama perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses finalisasi, harmonisasi, dan legalisasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana. Adapun dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang telah disusun sebagai berikut :

   - ✓ Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2029-2023 yang disusun oleh BAPPEDA Kota Magelang tahun 2028
   - ✓ Dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2023-2027

- ✓ Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Angin yang disusun tahun 2023
- ✓ Dokumen Rencana Kontijensi Tanah Longsor disusun tahun 2023
- ✓ Dokumen Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2024
- ✓ Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi Tahun 2025

2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana.

   Indikator ini mengukur cakupan penduduk yang berada di kawasan rawan bencana dan telah memperoleh informasi mengenai potensi serta jenis ancaman bencana di wilayahnya melalui kegiatan Sosialisasi, Kimunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Pemenuhan indikator memerlukan ketersediaan data kawasan rawan bencana yang memadai, informasi yang sesuai dengan karakteristik ancaman, serta mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan pemutakhiran data risiko bencana, penyediaan media informasi, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan agar informasi tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar diterima dan dipahami oleh masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan.

   Indikator ini menggambarkan cakupan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan penanggulangan bencana dilakukan melalui kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.. Pemenuhan target memerlukan pelaksanaan pelatihan yang terencana dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan jenis ancaman dan kebutuhan kapasitas di daerah. Selain jumlah peserta, peningkatan kualitas materi, keterampilan praktis, simulasi dan keterlibatan lintas perangkat daerah perlu menjadi perhatian agar pelatihan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesiapsiagaan daerah

4. Persentase Jumlah Warga Negara yang Ikut Pelatihan

   Indikator ini merupakan indikator SPM pada subkegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, yang mengukur cakupan warga negara yang memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana melalui pelatihan dan simulasi. Pelaksanaan indikator diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar mampu melakukan tindakan yang tepat sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana.

   Pencapaian indikator memerlukan pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis risiko, serta dukungan lintas perangkat daerah, kelurahan, komunitas, dan masyarakat agar cakupan peningkatan kapasitas dapat diperluas

5. Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

   Indikator ini mengukur cakupan warga negara yang memperoleh layanan melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) serta dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Layanan tersebut mendukung penerimaan, pengolahan, penyebarluasan informasi, koordinasi, dan pemantauan kejadian bencana secara cepat dan tepat.

   Pencapaian indikator memerlukan Pusdalops yang berfungsi secara optimal, didukung personel, sistem komunikasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan.

6. Persentase jumlah warga negara yg mendapat peralatan perlindungan.

   Indikator ini mengukur cakupan warga negara yang memperoleh peralatan perlindungan dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sesuai dengan jenis ancaman yang terdapat di wilayahnya.

Pencapaian indikator dipengaruhi oleh ketersediaan dan kecukupan peralatan perlindungan, kesesuaian peralatan dengan kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan distribusi dan pemanfaatannya secara tepat sasaran.

7. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB.

   Indikator ini mengukur kecepatan respons penanganan kejadian luar biasa (KLB) dalam waktu kurang dari 24 jam sejak ditetapkannya status KLB. Pencapaian indikator sangat dipengaruhi oleh adanya kejadian yang memenuhi kriteria KLB dan penetapan status oleh pihak yang berwenang, sehingga bersifat kondisional.

   Untuk mendukung pencapaian indikator, diperlukan kesiapsiagaan personel, mekanisme koordinasi, sistem komunikasi, serta dukungan sarana dan prasarana agar respons dapat dilakukan secara cepat dan tepat apabila terjadi KLB. Sampai dengan triwulan II Tahun 2026, belum ada kejadian yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa/KLB di Kota Magelang.

8. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.

   Indikator ini mengukur kecepatan respons penanganan bencana dalam waktu kurang dari 24 jam sejak ditetapkannya status keadaan darurat bencana. Pencapaian indikator bersifat kondisional, karena bergantung pada adanya kejadian yang memenuhi kriteria dan ditetapkannya status keadaan darurat bencana oleh pihak yang berwenang.

   Pencapaian indikator didukung oleh kesiapsiagaan personel, sistem komando dan koordinasi, komunikasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sehingga respons dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Sejak berdirinya Badang Penanggulangan Bencana Kota Magelang Tahun 2021 sampai dengan saat ini, belum ada kejadian bencana, memenuhi kriteria bencana, apalagi sampai ditetapkan sebagai status tanggap darurat bencana.

9. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana.

   Indikator ini mengukur persentase petugas yang aktif dan terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan pada saat terjadi keadaan darurat bencana. Pencapaian indikator dipengaruhi oleh adanya kejadian yang memerlukan penanganan darurat serta kesiapan dan ketersediaan petugas sesuai kebutuhan.

   Untuk mendukung pencapaian indikator, diperlukan kesiapsiagaan personel, pembagian tugas dan mekanisme koordinasi yang jelas, serta dukungan sarana dan prasarana agar penanganan darurat dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif.

10. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap bencana.

    Indikator ini mengukur persentase korban bencana yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi sesuai kebutuhan penanganan bencana. Pencapaian indikator bersifat kondisional, karena bergantung pada adanya kejadian bencana yang menimbulkan korban dan memerlukan tindakan pencarian, pertolongan, serta evakuasi.

    Pencapaian indikator didukung oleh kesiapsiagaan petugas, koordinasi dengan unsur terkait, serta ketersediaan sarana dan prasarana pencarian, pertolongan, dan evakuasi yang memadai.

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi salah satu acuan dalam mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, khususnya suburusan bencana. Pada suburusan bencana, indikator kinerja kunci digunakan untuk menggambarkan capaian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana. Indikator tersebut menjadi dasar dalam memastikan penyelenggaraan penanggulangan

bencana dilaksanakan secara terukur, terpadu, dan sesuai dengan kewenangan daerah.

1. Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku.

   Indikator ini mengukur persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan secara resmi dan masih berlaku sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen yang menjadi ukuran meliputi Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon). Sampai dengan triwulan II tahun 2026 belum ada dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan dimutakhirkan.

   Pencapaian indikator tidak hanya ditentukan oleh tersusunnya dokumen, tetapi juga oleh status penetapan dan masa berlakunya. Oleh karena itu, diperlukan percepatan finalisasi, penetapan, serta pemutakhiran dokumen kebencanaan sesuai kebutuhan dan perkembangan risiko bencana daerah.

2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

   Indikator ini mengukur persentase warga negara, khususnya yang berada di kawasan rawan bencana, yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Layanan tersebut mencakup edukasi, sosialisasi, pelatihan, simulasi, mitigasi, serta fasilitasi kesiapsiagaan masyarakat. Sampai dengan triwulan II tahun 2026 sebanyak 1.270 warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dari target 127.666 penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Magelang.

   Pencapaian indikator menunjukkan sejauh mana cakupan masyarakat telah memperoleh layanan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan dalam menghadapi risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan layanan secara berkelanjutan dan

berbasis risiko dengan dukungan lintas perangkat daerah, kelurahan, komunitas, dan masyarakat.

3. Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

   Indikator ini mengukur persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi bencana yang menimbulkan korban atau memerlukan tindakan penyelamatan. Realisasi kinerja atas indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan skala kejadian bencana di Kota Magelang. Pada periode pelaporan, kejadian bencana yang terjadi pada umumnya berskala kecil dan tidak memenuhi kriteria yang memerlukan penanganan penyelamatan dan evakuasi korban dalam kondisi darurat bencana sehingga realisasi kinerja atas indikator ini dianggap 100% dengan catatan tidak ada kejadian bencana memenuhi kriteria bencana. Pencapaiannya bersifat kondisional, karena bergantung pada adanya kejadian bencana dan kebutuhan pelayanan penyelamatan serta evakuasi.

   Pencapaian indikator didukung oleh kesiapsiagaan petugas, koordinasi dengan unsur terkait, serta ketersediaan sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi yang memadai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Identifikasi ini bertujuan untuk mengenali berbagai permasalahan, tantangan, peluang, serta faktor strategis yang memengaruhi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang lebih tepat sasaran. Isu-isu tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya, pencapaian

target Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Magelang, dinamika kebijakan nasional dan daerah, kondisi kebencanaan di wilayah Kota Magelang. Melalui identifikasi isu-isu penting tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kota Magelang dapat semakin adaptif, efektif, efisien, dan akuntabel dalam mewujudkan ketahanan daerah terhadap bencana, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025–2029. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan penanggulangan terdapat beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Kota Magelang Tahun 2027, sebagai berikut :

1. Belum tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang mutakhir yang sah/legal**.** Dokumen Kajian Risiko Bencana masih memerlukan penyempurnaan karena belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perencanaan karena belum memperoleh legalisasi serta belum sepenuhnya kriteria/standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini disebabkan, alokasi anggaran pada subkegiatan ini kurang memadai, sehingga untuk pelaksanaan asistensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengan Belum belum dapat dilaksanakan secara optimal. Padahal, proses asistensi tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan kualitas dokumen sesuai dengan atandar penyusunan sekaligus sebagai dasar dalam proses penetapan atau legalisasi dokumen.
2. Belum diperbaruinya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB Kota Magelang yang masih berlaku disusun pada tahun 2018 sehingga diperlukan pembaruan agar selaras dengan hasil Kajian Risiko Bencana terbaru, perkembangan regulasi, perubahan kondisi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Pada tahap Usulan Rancangan Awal Penyusunan Renja BPBD Kota Magelang, kegiatan atau pemutakhiran dokumen RPB telah diusulkan sebagai salah satu prioritas. Namun demikian, berdasarkan hasil koordinasi dan asistensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan pemutakhiran Dokumen RPB disarankan untuk ditunda dan memprioritaskan terlebih dahulu penyusunan serta penyempurnaan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan dokumen fundamental yang menjadi dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Kajian Risiko Bencana memuat identifikasi ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas daerah, serta analisis tingkat risiko bencana yang menjadi landasan dalam penentuan kebijakan, strategi, program, dan langkah-langkah penanggulangan bencana. Tanpa tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang mutakhir dan telah ditetapkan, penyusunan atau pemutakhiran Dokumen RPB berpotensi tidak sesuai dengan kondisi risiko bencana terkini dan belum memenuhi ketentuan penyusunan dokumen penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pada Tahun 2027 BPBD Kota Magelang memprioritaskan penyusunan, pemutkahiran dan penyempurnaan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun pada tahun 2023 sebagai dasar untuk mendukung penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pada tahun berikutnya. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan Dokumen RPB yang akan disusun memiliki kualitas yang lebih baik, berbasis data dan analisis risiko yang mutakhir, serta selaras dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional, provinsi, dan daerah.

3. Keterbatasan akses data kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana**.** Data kependudukan yang tersedia masih bersifat agregat sehingga belum sepenuhnya mendukung identifikasi kelompok rentan maupun kebutuhan penanganan pada saat tanggap darurat. sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan mekanisme berbagi data dengan perangkat daerah terkait.
4. Keterbatasan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara optimal. Kebijakan efisiensi belanja daerah mengakibatkan beberapa kegiatan strategis harus disesuaikan,

ditunda, atau dilaksanakan secara bertahap. Kondisi ini berpengaruh terhadap percepatan penyusunan dokumen kebencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya, penyediaan sarana prasarana, serta kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan.

5. Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Proses pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Magelang telah dimulai sejak awal tahun 2026. Namun demikian, hingga saat ini proses penetapan dan legalisasi forum tersebut masih dalam tahap penyelesaian hingga FPRB. Upaya pengurangan Risiko bencana. belum terbentuknya forum tersebut menyebabkan koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam upaya pengurangan risiko bencana belum berjalan secara optimal. Padahal, keterlibatan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat merupakan faktor penting dalam membangun ketahanan daerah terhadap bencana
6. Perlu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam mitigasi serta kesiapsiagaan bencana. Meskipun Kota Magelang relatif jarang mengalami bencana dengan skala besar, potensi ancaman bencana tetap ada. Oleh karena itu, peningkatan literasi kebencanaan, edukasi kepada masyarakat, pelatihan, simulasi, serta penguatan kapasitas aparatur dan relawan tetap menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana.
7. Perlunya penguatan sinergi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Penanggulangan bencana merupakan urusan yang bersifat lintas sektor sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi, integrasi, dan kolaborasi antarperangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media, serta masyarakat. Penguatan sinergi tersebut diperlukan mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.

Berbagai isu penting tersebut menjadi dasar dalam penyusunan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan BPBD Kota Magelang Tahun 2027.

Melalui penetapan prioritas yang tepat, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat semakin efektif dalam meningkatkan kapasitas daerah, mengurangi risiko bencana, serta mendukung terwujudnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim sesuai arah kebijakan pembangunan Kota Magelang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada pertengahan bulan Februari 2026 telah dimulai proses penyusunan Renja Tahun 2027 melalui input perencanaan pada SIPD RI. Namun demikian, dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah Kota Magelang yang mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2026, diperlukan penyesuaian dalam penyusunan Renja Tahun 2027. Sejalan dengan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Magelang yang mengarahkan perangkat daerah untuk melakukan efisiensi belanja, penajaman prioritas program dan kegiatan, serta memastikan perencanaan tetap selaras dengan kapasitas fiskal daerah, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengatur kebijakan tentang perencanaan tahun 2027 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah yang tidak memiliki program unggulan, pokir, maupun kebijakan daerah serta ,
2. Perangkat daerah yang memiliki program unggulan, pokir maupun kebijakan daerah.

BPBD Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang tidak memiliki program unggulan, tidak ada pokir maupun kebijakan daerah di tahun 2027 maka formula Renja Tahun 2027 sebagai berikut,

1. Belanja diluar gaji dan tunjangan as (PNS, PPPK, dan PPK Paruh waktu, belanja jasa tenaga non asn, belanja jasa langganan air, listrik, telpon dan internet dianggarkan 75% dari anggaran tahun 2026
2. Alokasi belanja makanan dan minuman dibatasi hanya berupa snack
3. Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya tidak diperbolehkan kecuali rusak berat

4. Pemeliharaan kendaraan jabatan dan pemeliharaan kendaraan operasional lapangan kantor tahun 2027 tidak diperbolehkan, kecuali BBM, Oli, Pajak dan kendaraan operasional untuk pelayanan masyarakat
5. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, mebel, dan aset lainnya tidak diperbolehkan
6. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tidak diperbolehkan
7. Tidak diberikan pangganti tranasport untuk pelatihan
8. Kegiatan peningkatan kapasitas tidak diperbolehkan, kecuali OPD pengampu utama
9. Kegiatan rapat, sosialisasi, dan bimtek tidak boleh dilaksanakan di luar Kota Magelang
10. Jika memungkinkan rakor/sosialisai dilakukan secara kolaboratif antar subkegiatan, dilaksanakan dalam lingkup dalam kota, serta memanfaatkan teknologi seperti Zoom.
11. Belanja Perjalanan Dinas pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Ex-BAU) maksimal 75% dari Tahun 2026.
12. Belanja Perjalanan Dinas di luar Ex BAU yang melekat pada kegiatan maksimal 50% dari anggaran tahun 2026.
13. Penggunaan ATK menerapkan prinsip less paper, dibatasi maksimal 50% dari Anggaran Tahun 2026.
14. Penggunaan ATK pada belanja modal fisik/non fisik adalah sesuai kebutuhan, bukan memaksimalkan aturan persentase.

Berdasarkan hasil pembahasan, dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria di atas pada penyusunan Renja BPBD Kota Magelang mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dari jumlah pagu anggaran yang mengalami penurunan, maupun penyesuaian terhadap subkegiatan, pengalihan subkegiatan, serta penghapusan subkegiatan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah penghapusan subkegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota, yang semula direncanakan untuk mendukung penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi

menghadapi ancaman erupsi gunung api. Penghapusan subkegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta perlunya memprioritaskan program dan kegiatan yang lebih mendesak dan memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi. Dengan demikian, subkegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota tidak mendapatkan alokasi anggaran dalam Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027.
Selain mempedomani kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Magelang, dalam proses penyusunan Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 juga telah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir April 2026. Hasil koordinasi dan konsultasi tersebut memberikan arahan agar Pemerintah Kota Magelang melakukan reviu terhadap Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah yang telah disusun pada tahun 2023, mengingat dokumen tersebut memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun sehingga pada tahun 2027 dinilai tepat untuk dilakukan pemutakhiran.
Menindaklanjuti arahan tersebut, pada rancangan awal Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 dilakukan penyesuaian kegiatan, di mana rencana kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dialihkan menjadi kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota, guna memastikan ketersediaan dokumen kajian yang mutakhir sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana di daerah.
Adapun review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2027

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Magelang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kota Magelang**	**Nilai SAKIP**	90.16	3.625.526.492	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Magelang**	**Nilai SAKIP**	90.16	3.625.458.036	
		Kota Magelang	**Nilai KOD**	43			**Kota Magelang**	**Nilai KOD**	43		
		Kota Magelang	**Nilai Kearsipan**	77.49			**Kota Magelang**	**Nilai Kearsipan**	77.49		
		Kota Magelang	**MRI**	3.002			**Kota Magelang**	**MRI**	3.002		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Magelang**	**Cakupan terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja**	**100%**	**7.574.600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Magelang**	**Cakupan terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran,**	**100%**	1.953.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			perangkat daerah					**evaluasi kinerja perangkat daerah**			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen PerencanaannPerangkat Daerah	2 Dokumen	1.918.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen PerencanaannPerangkat Daerah	2 Dokumen	665.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	436.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	135.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	436.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	135.100	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	740.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	197.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	740.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	197.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	13 Laporan	3.301.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	13 Laporan	622.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Magelang**	**Cakupan terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan**	**100%**	**3.065.195.494**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Magelang**	**Cakupan terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan**	**100%**	**3.241.299.600**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	3.059.615.094	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	3.234.063.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	481.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	122.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.098.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	7.113.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Magelang**	**Cakupan terpenuhnya administrai Umum perangkat daerah**	**100%**	**134.399.850**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Magelang**	**Cakupan terpenuhnya administrai Umum perangkat daerah**	**100%**	**35.614.300**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.695.550	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.192.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.570.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	283.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.515.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.303.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.905.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.269.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.240.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.215.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	17.842.500	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.797.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	960.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	270.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	71.670.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17.283.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Magelang**	**Cakupan terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**144.582.448**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Magelang**	**Cakupan terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**243.011.836**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.715.300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.266.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53.300.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.600.548	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189.211.836	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Magelang**	**Cakupan terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**273.774.100**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Magelang**	**Cakupan terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**103.578.900**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	90.719.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	26.912.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	79.700.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	71.710.700	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	26.067.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4.956.200	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	77.287.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
	Program Penanggulangan Bencana	**Kota Magelang**	**Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana**	**0.98**	**670.533.176**	**Program Penanggulangan Bencana**	**Kota Magelang**	**Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana**	**0.98**	**180.861.070**	
		Kota Magelang	**Presentase penanganan tanggap darurat bencana**	**100%**	**264.880.440**			**Presentase penanganan tanggap darurat bencana**	**100%**	**126.650.806**	
		Kota Magelang	**Presentase penanganan pascabencana**	**100%**	**136.276.700**			**Presentase penanganan pascabencana**	**100%**	**12.435.500**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	**Kota Magelang**	**Jumlah kegiatan sosialisasi informasi rawan bencana**	**1 Laporan**	**20.122.500**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**	**Kota Magelang**	**Jumlah kegiatan sosialisasi informasi rawan bencana**	**1 Laporan**	119.101.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya di Kota Magelang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	20.122.500	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Magelang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	100 Orang	7.575.050	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								tinggalnya selama 1 (satu) tahun			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya di Kota Magelang	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		111.526.750	
	Keg Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**Kota Magelang**	**Jumlah kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan**	**5 Laporan**	**650.410.676**	**Keg Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Kota Magelang**	**Jumlah kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang**	**5 Laporan**	61.759.270	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dilaksanakan			
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Magelang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	17 Unit	29.831.200	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Magelang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	16 Unit	27.047.470	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Magelang	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 Orang	17.200.300	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Magelang	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 Orang	4.938.600	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kelurahan Panjang & Kel Cacaban	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan	29.052.300	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kelurahan Kelurahan Panjang & Kel Cacaban	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan	4.762.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Tim TRC yan telah dibentuk BPBD dengan keputusan Ka OPD	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	23.546.800	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Tim TRC yan telah dibentuk BPBD dengan keputusan Ka OPD	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	12.167.700	
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	75.513.700	-	-	-	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	206.015.776	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	4.084.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	241.118.300	-	-	-	-		Hasil Koordinasi dgn BPBD Prov Jateng dan BNPB, diarahkan untuk dialihkan kegiatan penyusunan/pemutakhiran Dokumen Kajian Risiko Bencana.
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	28.132.300	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan	100 Orang	8.759.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								pencegahan dan mitigasi bencana			
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Kota Magelang**	**Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**264.880.440**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kota Magelang**	**Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	126.650.806	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kota Magelang	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 Laporan	6.132.600	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kota Magelang	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/W	4 Laporan	600.336	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								abah Prioritas			
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	189.412.340	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	102.759.590	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 Orang	9.720.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 Orang	2.382.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Orang	34.837.900	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Orang	18.322.980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Aktivasi Sistem Komando	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	24.777.600	Aktivasi Sistem Komando	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	2.585.900	
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Kota Magelang**	**Jumlah kegiatan penataan sisten dasar penanggulangan bencana**	**1 Kegiatan**	**136.276.700**	**Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kota Magelang**	**Jumlah Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**1 Kegiatan**	**12.435.500**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Kegiatan	136.276.700	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Kegiatan	12.435.500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan perencanaan yang partisipatif, responsif, dan akuntabel. Melalui proses ini, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai mekanisme, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokok-pokok pikiran DPRD, forum konsultasi publik, maupun forum penyampaian aspirasi lainnya, dikaji kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam rangka penanggulangan bencana, penelaahan usulan masyarakat dilakukan untuk memastikan bahwa usulan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dapat mendukung peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Setiap usulan dianalisis berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, lokasi, potensi risiko bencana, serta kesesuaiannya dengan sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD dan RPJMD Kota Magelang.

Hasil penelaahan tersebut menjadi dasar dalam menentukan usulan yang dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD sesuai dengan kewenangan perangkat daerah, ketersediaan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, usulan yang belum dapat diakomodasi akan menjadi bahan pertimbangan pada perencanaan tahun berikutnya atau direkomendasikan kepada perangkat daerah lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan substansi usulan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Magelang Tahun 2027, tidak dilaksanakan pembahasan secara khusus melalui mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD). Selain itu, pada tahapan perencanaan juga tidak terdapat usulan program maupun kegiatan yang disampaikan kepada BPBD Kota Magelang oleh para pemangku kepentingan, baik melalui forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum perangkat daerah, maupun mekanisme penyampaian usulan lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat kebutuhan baru yang diusulkan secara langsung kepada BPBD Kota Magelang di luar program dan kegiatan yang telah dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 lebih difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, analisis capaian kinerja perangkat daerah, identifikasi isu-isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Magelang.

Meskipun tidak dilakukan FGD serta tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, proses penyusunan Renja tetap mengedepankan prinsip perencanaan yang sistematis, terukur, dan akuntabel. Penyusunan dokumen mengacu pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2025–2029, Renstra BPBD Kota Magelang Tahun 2025–2029, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, serta berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan pendekatan tersebut, program dan kegiatan yang direncanakan tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelayanan dasar di bidang penanggulangan bencana, meningkatkan kapasitas daerah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan, memperkuat respons tanggap darurat, serta mendukung pemulihan pascabencana secara efektif dan berkelanjutan.

Tidak adanya usulan dari para pemangku kepentingan tidak mengurangi kualitas proses perencanaan. Sebaliknya, BPBD Kota Magelang tetap memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan disusun berdasarkan kebutuhan riil daerah, hasil analisis risiko bencana, evaluasi kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta sinkronisasi dengan sasaran, prioritas, dan target pembangunan daerah sehingga pelaksanaan Renja Tahun 2027 diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan ketahanan Kota Magelang dalam menghadapi bencana.

Dengan demikian, pada penyusunan Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat maupun pemangku kepentingan melalui Musrenbang, Forum Perangkat Daerah, Focus Group Discussion (FGD), maupun mekanisme usulan lainnya.

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027

Kota Magelang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Magelang Tahun 2027. Telaahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, kegiatan, dan target kinerja yang direncanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang penanggulangan bencana. Keselarasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan di daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2027, BPBD Kota Magelang memperhatikan berbagai dokumen perencanaan dan kebijakan nasional yang menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dimana

- fokus arah kebijakan yang " Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi" melalui " Peningkatan Ketangguhan Manusia dan Masyarakat Dalam Menghadapi Berbagai Perubahan dan Bencana",
- fokus Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029 " Penurunan Kemiskinan" selaras dengan penanggulangan bencana, walaupun bukan perangkat daerah yang secara langsung melaksanakan pengentasan kemiskinan. Peran BPBD lebih kepada melindungi kelompok rentan dari dampak bencana, serta mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana, mencegah masyarakat jatuh kedalam kemiskinan akibat bencana dikarenakan bencana menyebabkan hilangnya mata pencaharian, kerusakan, sehingga terganggu aktivitas ekonomi. Melalui Upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan,

BPBD berperan mengurangi Risiko tersebut sehingga masyarakat tidak jatuh dalam kemiskinan.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) Tahun 2025–2029, RENAS PB memberikan pedoman nasional tentang strategi pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemulihan pascabencana, serta integrasi kebencanaan dalam pembangunan berkelanjutan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dokumen-dokumen tersebut menjadi acuan dalam menetapkan prioritas pembangunan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Magelang.

Melalui telaahan kebijakan nasional, BPBD Kota Magelang memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Dengan demikian, Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang terarah, terpadu, efektif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025–2029, BPBD Kota Magelang menetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi arah penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan BPBD Kota Magelang adalah **"Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana."** Tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Magelang yang memiliki

kemampuan dalam mengantisipasi, mencegah, mengurangi risiko, merespons, dan memulihkan dampak bencana secara efektif. Ketahanan daerah tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah dalam menangani bencana, tetapi juga dari meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat, tersedianya sistem penanggulangan bencana yang andal, serta terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan daerah yang aman dan tangguh terhadap bencana.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BPBD Kota Magelang menetapkan sasaran, yaitu **"Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana."** Sasaran ini diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Peningkatan kapasitas tersebut diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, penyebarluasan informasi dan edukasi kebencanaan, penyusunan dokumen perencanaan kebencanaan, serta pengembangan sistem koordinasi dan kolaborasi yang efektif. Adapun target tujuan dan sasaran pada rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2027 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0.59
2		Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Nilai	0.88
			Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Nilai	0.70

			Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Nilai	0.94
			Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Nilai	0.90
			Indeks Prioritas Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Nilai	0.49
			Indeks Prioritas Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Nilai	0.47
			Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Nilai	0.47

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Magelang Tahun 2027 diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan daerah terhadap berbagai ancaman bencana, mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan, melindungi keselamatan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan Kota Magelang yang berkelanjutan, aman, dan berdaya saing.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BPBD Kota Magelang Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025–2029. Penyusunannya dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Perumusan program dan kegiatan Tahun 2027 mempertimbangkan berbagai faktor strategis sebagai dasar penentuan prioritas. Pertama, program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam mewujudkan daerah yang aman, tangguh, dan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu, setiap program yang direncanakan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan bencana serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kedua, penyusunan program dan kegiatan juga memperhatikan kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Penanggulangan bencana yang efektif merupakan salah satu prasyarat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan karena mampu mengurangi kerugian ekonomi, melindungi kelompok masyarakat rentan, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Ketiga, program dan kegiatan BPBD turut mendukung upaya penurunan angka kemiskinan melalui pengurangan risiko bencana. Bencana berpotensi menimbulkan kehilangan mata pencaharian, kerusakan aset produktif, serta meningkatnya beban ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan percepatan pemulihan pascabencana menjadi bagian penting dalam mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan maupun memperburuk kondisi masyarakat yang sudah berada pada kelompok rentan.

Keempat, penyusunan program dan kegiatan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai acuan penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana. Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas program dan

kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, program dan kegiatan BPBD Kota Magelang Tahun 2027 dirumuskan agar mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh, meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, serta memberikan kontribusi terhadap terwujudnya pembangunan Kota Magelang yang tangguh, aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027, perumusan program dan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan perangkat daerah sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan Pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana pada BPBD Kota Magelang dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana sebagai program teknis yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD. Selain itu, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan internal perangkat daerah, BPBD juga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kedua program tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan dan subkegiatan BPBD Kota Magelang Tahun 2027 yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah, yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana, serta sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Melalui kedua program tersebut diharapkan

penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat terlaksana secara efektif, mulai dari upaya pencegahan dan mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang didukung oleh tata kelola pemerintahan perangkat daerah yang akuntabel, efektif, dan efisien. Sebagai implememtasi dari Program Penanggulangan Bencana, BPBD Kota Magelang melaksanakan empat kegiatan utama yang merupakan wujud penyelenggaraan pelayanan pada Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu pada seluruh tahapan, mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kebencanaan sebagai dasar dalam upaya pengurangan risiko bencana.
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, yang difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana.
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yang diarahkan untuk menjamin penanganan darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi guna meminimalkan korban jiwa maupun kerugian, serta
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, yang bertujuan memperkuat sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penguatan regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan kemitraan, sistem informasi kebencanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan dokumen penanggulangan bencana, serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana untuk mendukung tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Keempat kegiatan tersebut saling mendukung dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensif dan

berkelanjutan. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, BPBD Kota Magelang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, sehingga tujuan perangkat daerah, yaitu meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana**,** dapat tercapai secara optimal. Selain melaksanakan Program Penanggulangan Bencana sebagai program teknis, BPBD Kota Magelang juga menyelenggarakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berfungsi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara optimal.

Sebagai implementasi dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kota Magelang melaksanakan lima kegiatan, yaitu :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**,** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**,**
- Administrasi Umum Perangkat Daerah**,**
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta**,**
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kelima kegiatan tersebut merupakan unsur pendukung yang memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya manajemen perangkat daerah secara efektif. Melalui kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja, BPBD memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan disusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Administrasi keuangan dan administrasi umum berperan dalam mendukung tertib pengelolaan keuangan, administrasi perkantoran, serta pelayanan internal organisasi. Sementara itu, penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan barang milik daerah ditujukan untuk menjamin ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan pendukung sehingga operasional BPBD dapat berjalan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan didukung penyelenggaraan Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang baik, pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dapat berlangsung secara lebih efektif, sehingga tujuan BPBD Kota Magelang dalam meningkatkan ketahanan daerah dan kapasitas penanggulangan bencana dapat tercapai secara optimal.

Usulan pagu pada Rancangan Awal Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 mengalami penyesuaian dari semula sebesar Rp4.697.216.808,- menjadi Rp3.945.405.412,-, atau berkurang sebesar Rp751.811.396,-. Penyesuaian pagu tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyelarasan terhadap kemampuan keuangan daerah, arah kebijakan pembangunan, serta prioritas pendanaan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2027.

Atas penyesuaian tersebut, BPBD Kota Magelang melakukan penyesuaian terhadap rencana program, kegiatan, dan subkegiatan tanpa mengurangi fokus pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Prioritas pelaksanaan tetap diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, penguatan ketahanan daerah terhadap bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung tercapainya target kinerja BPBD Kota Magelang Tahun 2027.

Salah satu perubahan yang paling signifikan dalam penyusunan Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 adalah penyesuaian pada rencana pelaksanaan subkegiatan. Pada usulan pagu Rancangan Awal Renja Tahun 2027 semula dialokasikan anggaran sebesar Rp241.118.300,- untuk Subkegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota. Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dokumen RPB yang saat ini dimiliki Pemerintah Kota Magelang telah disusun pada Tahun 2018, sehingga masa berlakunya telah berakhir. Selain itu, dokumen tersebut disusun oleh Bappeda Kota Magelang karena pada saat itu BPBD Kota Magelang belum terbentuk sebagai perangkat daerah.

Namun demikian, berdasarkan hasil koordinasi BPBD Kota Magelang dengan BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah pada akhir bulan April 2026, diperoleh arahan bahwa prioritas penyusunan dokumen pada Tahun 2027 sebaiknya

difokuskan pada pembaruan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota. Arahan tersebut mempertimbangkan bahwa dokumen KRB yang tersedia juga telah memasuki masa kedaluwarsa dan memerlukan pemutakhiran sesuai dengan kondisi risiko bencana terkini. Di samping itu, dokumen KRB yang disusun pada Tahun 2023 belum ditetapkan melalui proses legalisasi, sehingga belum memiliki kekuatan administratif sebagai dokumen acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota pada Tahun 2027 disesuaikan menjadi Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota. Seiring dengan perubahan tersebut, pagu anggaran yang semula diusulkan sebesar Rp. 241.118.300,- disesuaikan berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Magelang menjadi sebesar Rp. 111.526.750,-**.**

Penyesuaian pagu anggaran tersebut tidak hanya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga didasarkan pada hasil koordinasi dan pemahaman teknis bahwa proses penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota tidak dapat diselesaikan secara utuh hingga memperoleh pengesahan dan legalisasi dalam satu tahun anggaran. Pada Tahun 2027, pelaksanaan kegiatan direncanakan difokuskan pada tahapan penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Selanjutnya, untuk memperoleh legalisasi, dokumen tersebut harus melalui proses asistensi dan reviu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta BPBD Provinsi Jawa Tengah, yang direncanakan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, penyelesaian keseluruhan dokumen masih memerlukan dukungan alokasi anggaran pada tahun selanjutnya.

Penyesuaian pagu anggaran tersebut diharapkan tetap mampu menghasilkan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang komprehensif sebagai dasar penyediaan data dan analisis risiko bencana yang mutakhir. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan program dan kegiatan

penanggulangan bencana di Kota Magelang secara lebih terarah, terpadu, dan berbasis risiko.

Selain subkegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang dialihkan menjadi subkegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota, terdapat pula perubahan pada Subkegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota**.** Pada usulan Rancangan Awal Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027, subkegiatan tersebut diusulkan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.513.700,-**.** Namun, dalam proses pembahasan dan penyesuaian pagu anggaran, subkegiatan tersebut tidak dapat diakomodasi (dihapus/drop) karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Meskipun demikian, kebutuhan penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi tetap menjadi perhatian BPBD Kota Magelang sebagai salah satu dokumen penting dalam mendukung kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan penyusunan dokumen tersebut akan diupayakan kembali pada tahun perencanaan berikutnya, dengan tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas fiskal Pemerintah Kota Magelang. Secara keseluruhan atas penyesuaian pagu anggaran pada Renja BPBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2027 sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP**	Kota Magelang	**90,16**	**3.625.458.036**	**DAU**	**-**	**90,21**	**3.996.216.748**
		Nilai KOD		**43**				**45**	
		Nilai Kearsipan		**77,49**				**80,49**	
		MRI		**3,002**				**3,003**	

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja**	Kota Magelang	**100%**	**1.953.400**	**DAU**	**-**	**100%**	**8.674.350**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kota Magelang	2 Dokumen	665.300	DAU	-	2 dokumen	2.205.900
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	1 Dokumen	135.100	DAU	-	1 dokumen	501.975

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	1 Dokumen	135.100	DAU	-	1 dokumen	501.975
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Magelang	1 Dokumen	197.900	DAU	-	1 dokumen	852.000

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	1 Dokumen	197.900	DAU	-	1 dokumen	852.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	13 Laporan	622.100	DAU	-	13 dokumen	3.760.500

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan perankat daerah yang tersedia**	Kota Magelang	**100%**	**3.241.299.600**	**DAU**	-	**100%**	**3.371.993.703**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	28 Orang	3.234.063.200	DAU	-	20 orang	3.365.576.603
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Magelang	1 Laporan	122.600	DAU	-	1 laporan	554.100

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Magelang	12 Laporan	7.113.800	DAU	-	12 laporan	5.863.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentasi administrasi umum yang tersedia**	Kota Magelang	**100%**	**35.614.300**	**DAU**	-	**100%**	**97.960.000**

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	1 Paket	1.192.100	DAU	-	4 paket	3.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	1 Paket	283.200	DAU	-	2 paket	1.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	3 Paket	9.303.600	DAU	-	12 paket	17.500.000

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Magelang	1 Paket	2.269.800	DAU	-	8 paket	5.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Magelang	2 Dokumen	1.215.000	DAU	-	2 dokumen	3.600.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Magelang	1 Paket	3.797.600	DAU	-	12 paket	8.400.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang		270.000	DAU	-	12 laporan	960.000

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	1 Laporan	17.283.000	DAU	-	12 laporan	58.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	Kota Magelang	**100%**	**243.011.836**	**DAU**	**-**	**100%**	**347.590.695**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	12 Laporan	500.000	DAU	-	12 laporan	60.500.000

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Magelang	12 Laporan	53.300.000	DAU	-	12 laporan	12.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	12 Laporan	189.211.836	DAU	-	12 laporan	275.090.695
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milikk daerah yang dipelihara**	Kota Magelang	**100%**	**103.578.900**	**DAU**	-	**100%**	**169.998.000**

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Magelang	5 Unit	26.912.000	DAU	-	11 Unit	75.571.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Magelang	8 Unit	71.710.700	DAU	-	2 Unit	83.427.000

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Magelang	32 Unit	4.956.200	DAU	-	8 Unit	11.000.000
	Program Penanggulangan Benvana	**Persentase Layanan penanggu langan bencana**	Kota Magelang	**100%**	**319.947.376**	**DAU**	**-**		**1.118.815.643**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase warga negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Kota Magelang	**100%**	**119.101.800**	**DAU**	**-**	**1 laporan**	**22.134.750**

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Magelang	60 Orang	7.575.050	DAU	-	120 orang	22.134.750

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Magelang	1 dokumen	111.526.750	DAU	**0**	0	0
	Keg Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan**	**Kota Magelang**	**5 Laporan**	**61.759.270**	**DAU**	**-**	**5 laporan**	**629.139.990**

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kota Magelang	16 Unit	27.047.470	DAU	-	30 Unit	231.010.450
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kota Magelang	25 Orang	4.938.600	DAU	-	150 orang	18.920.300

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Magelang	2 Kawasan (Utara, Selatan)	4.762.100	DAU	-	2 kawasan Sekolah	31.957.530
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kota Magelang	30 Orang	12.167.700	DAU	-	30 orang	31.133.520

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Magelang	12 Laporan	4.084.200	DAU	-	12 laporan	285.172.660

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Magelang	90 Orang	8.759.200	DAU	-	3 kawasan	30.945.530
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	Kota Magelang	**100%**	**126.650.806**	**DAU**	**-**	**100%**	**317.636.203**

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kota Magelang	4 Laporan	600.336	DAU	-	4 laporan	6.695.794
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kota Magelang	1 Dokumen	102.759.590	DAU	-	2 dokumen	225.275.974

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Magelang	1 Orang	2.382.000	DAU	-	1 orang	21.000.000
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Magelang	20 Orang	18.322.980	DAU	-	15 orang	37.771.690

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aktivasi Sistem Komando	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kota Magelang	1 Laporan	2.585.900	DAU	-	1 laporan	26.892.745
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersedia**	Kota Magelang	**1 Kegiatan**	**12.435.500**	**DAU**	**-**	**9 kegiatan**	**149.904.700**

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kota Magelang	1 Kegiatan	12.435.500	DAU	-	12 kegiatan	149.904.700

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan penjabaran program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunannya mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025–2029, Renstra BPBD Kota Magelang Tahun 2025–2029, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan hasil penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Rencana kerja dan pendanaan BPBD Kota Magelang Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Fokus pelaksanaan diarahkan pada peningkatan kapasitas daerah dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penguatan sistem dasar penanggulangan bencana guna mendukung peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim.

Sejalan dengan hasil pembahasan Rancangan Renja Tahun 2027, rencana kerja dan pendanaan BPBD Kota Magelang mengalami penyesuaian terhadap pagu anggaran, ruang lingkup kegiatan, serta komposisi subkegiatan. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bentuk penyelarasan terhadap prioritas pembangunan daerah, kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan kemampuan keuangan daerah, sehingga alokasi sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2027

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan /Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran				Jumlah
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**1.356.839.363**	**1.105.449.507**	**831.127.297**	**651.989.245**	**3.945.405.412**
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**1.356.839.363**	**1.105.449.507**	**831.127.297**	**651.989.245**	**3.945.405.412**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**1.289.031.872**	**1.037.810.318**	**786.582.018**	**512.033.828**	**3.625.458.036**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**323.900**	**318.100**	**915.750**	**395.650**	**1.953.400**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.000	115.000	269.650	217.650	**665.300**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	135.100	-	**135.100**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	-	-	135.100	-	**135.100**

No	Urusan /Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran				Jumlah
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7
	Perubahan RKA-SKPD					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	197.900	-	-	-	**197.900**
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	197.900	-	**197.900**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.000	203.100	178.000	178.000	**622.100**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.156.516.398**	**926.175.982**	**694.680.867**	**463.926.353**	**3.241.299.600**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.155.022.573	924.018.057	693.013.542	462.009.028	**3.234.063.200**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		122.600			**122.600**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.493.825	2.035.325	1.667.325	1.917.325	**7.113.800**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**9.642.600**	**8.598.350**	**9.209.400**	**8.163.950**	**35.614.300**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	596.050	-	596.050	-	**1.192.100**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.200	-	-	-	**283.200**

No	Urusan /Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran				Jumlah
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	**9.303.600**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	567.450	567.450	567.450	567.450	**2.269.800**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	450.000	315.000	450.000	-	**1.215.000**
	Penyediaan Bahan/Material	949.250	949.250	949.250	949.850	**3.797.600**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000	120.000	-	-	**270.000**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.320.750	4.320.750	4.320.750	4.320.750	**17.283.000**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**97.508.299**	**76.569.111**	**55.535.326**	**13.399.100**	**243.011.836**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.150	173.500	163.250	74.100	**500.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.325.000	13.325.000	13.325.000	13.325.000	**53.300.000**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.094.149	63.070.611	42.047.076		**189.211.836**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**25.040.675**	**26.148.775**	**26.240.675**	**26.148.775**	**103.578.900**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	6.728.000	6.728.000	6.728.000	6.728.000	**26.912.000**

No	Urusan /Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran				Jumlah
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7
	atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.927.675	17.927.675	17.927.675	17.927.675	**71.710.700**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	385.000	1.493.100	1.585.000	1.493.100	**4.956.200**
	Program Penanggulangan Benvana	**67.807.491**	**67.639.189**	**44.545.279**	**139.955.417**	**319.947.376**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**5.109.950**	**8.617.500**	**5.374.350**	**100.000.000**	**119.101.800**
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	3.787.550	3.787.500			**7.575.050**
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1.322.400	4.830.000	5.374.350	100.000.000	**111.526.750**
	Keg Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**27.608.024**	**25.802.172**	**1.613.512**	**6.735.562**	**61.759.270**
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19.002.774	6.859.772	592.462	592.462	**27.047.470**

No	Urusan /Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran				Jumlah
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	2.469.300	-	2.469.300	**4.938.600**
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	4.762.100	-	-	**4.762.100**
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	825.000	8.689.950	-	2.652.750	**12.167.700**
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.021.050	1.021.050	1.021.050	1.021.050	**4.084.200**
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	6.759.200	2.000.000	-	-	**8.759.200**
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**31.295.642**	**30.795.642**	**33.763.542**	**30.795.980**	**126.650.806**
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	150.000	150.000	150.000	150.336	**600.336**
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	25.689.897	25.689.897	25.689.897	25.689.899	**102.759.590**
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	875.000	375.000	757.000	375.000	**2.382.000**
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	4.580.745	4.580.745	4.580.745	4.580.745	**18.322.980**

No	Urusan /Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran				Jumlah
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7
	Bencana Kabupaten/Kota					
	Aktivasi Sistem Komando			2.585.900		**2.585.900**
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**3.793.875**	**2.423.875**	**3.793.875**	**2.423.875**	**12.435.500**
	Koordinasi dan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	3.793.875	2.423.875	3.793.875	2.423.875	**12.435.500**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Magelang Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan BPBD Kota Magelang selama Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran Renstra BPBD Kota Magelang Tahun 2025–2029 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, serta kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaan Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2027 perlu dilaksanakan secara konsisten, terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan berorientasi pada pencapaian hasil. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan bencana melalui penguatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penguatan sistem dasar penanggulangan bencana, sehingga sasaran pembangunan daerah di bidang ketahanan terhadap bencana dapat tercapai secara optimal.

Dalam pelaksanaan penyelanggaraan penanggulangan bencana, , terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan :

- Terhadap indikator kinerja subkegiatan terdapat kemungkinan tidak seluruhnya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan sebagian subkegiatan teknis merupakan kegiatan yang bersifat mandatori dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana. Karakteristik kegiatan tersebut pada dasarnya bersifat kontinjensi atau cadangan, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi dan kejadian bencana di lapangan. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun anggaran tidak terjadi bencana dengan skala atau intensitas tertentu, maka realisasi output pada subkegiatan tersebut dapat berada di bawah target yang direncanakan bahkan

tidak tercapai.

- Selain keterbatasan kemampuan keuangan daerah, terdapat kegiatan yang pelaksanaannya memerlukan penyelesaian secara bertahap sehingga tidak dapat diselesaikan sampai sah/legal dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini adalah **Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota**, yang pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan baru sampai pada tahapan penyusunan dokumen. Sesuai mekanisme yang berlaku, dokumen tersebut selanjutnya harus melalui proses asistensi, reviu, penyempurnaan, oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta BPBD Provinsi Jawa Tengah sebelum dapat ditetapkan sebagai dokumen resmi (sah dan legal). Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2028 masih diperlukan dukungan alokasi anggaran untuk melanjutkan tahapan tersebut hingga Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota memperoleh legalisasi.
- Setelah Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota memperoleh legalisasi, langkah strategis berikutnya adalah menyusun atau memutakhirkan **Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota**. Dokumen RPB yang dimiliki Pemerintah Kota Magelang saat ini disusun pada Tahun 2018 sehingga telah berakhir masa berlakunya dan tidak lagi sepenuhnya menggambarkan kondisi risiko bencana terkini. Oleh karena itu, penyusunan atau pemutakhiran Dokumen RPB perlu diprogramkan dalam rencana kerja dan penganggaran tahun berikutnya dengan menjadikan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah disahkan sebagai dasar penyusunannya. Dengan demikian, kebijakan, strategi, arah penyelenggaraan, serta rencana aksi penanggulangan bencana dapat disusun secara lebih komprehensif, terpadu, dan berbasis pada kondisi risiko bencana yang mutakhir.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2027, diperlukan penguatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara BPBD Kota Magelang dengan BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah, perangkat daerah terkait, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, relawan, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, capaian indikator kinerja, dan realisasi anggaran perlu dilaksanakan secara berkala sebagai dasar dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan langkah perbaikan, serta memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Magelang, Juli 2026

Mengetahui,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

PUJI HARTONO, S.T.
NIP. 19710717 200312 1 006